

SKRIPSI

**PERAN DINAS KOPERASI UMKM DALAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI
KABUPATEN DOMPU**



Disusun Oleh :

FITRI RAHMA
2019BIC033

KONSENTRASI PERBANKAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2023

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN DINAS KOPERASI UMKM DALAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN DOMPU

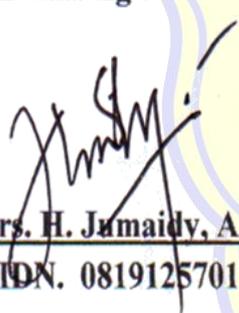
Oleh:

FITRI RAHMA

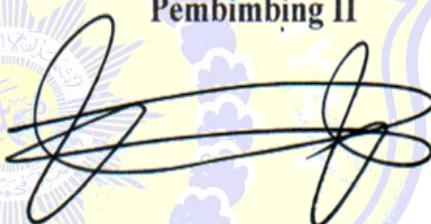
Untuk Memenuhi Ujian Akhir
Pada Tanggal, 11 Januari 2023

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I


Drs. H. Jamaidy, AM., M.P
NIDN. 0819125701

Pembimbing II


RAMAYANTO, S.Sos., M.M.
NIDN. 0809096702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Niaga

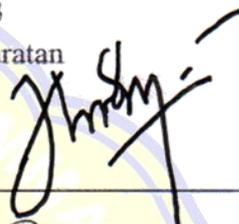

LALU HENDRA MANIZA, S.Sos., M.M
NIDN. 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN
PERAN DINAS KOPERASI UMKM DALAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KABUPATEN DOMPU

Oleh:
FITRI RAHMA

Telah dipertahankan di depan pengujii
Pada Tanggal, 11 Januari 2023
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan
Tim Penguji

Drs. H. Jumaidy, AM.,M.P.
NIDN. 0819125701

PU ()

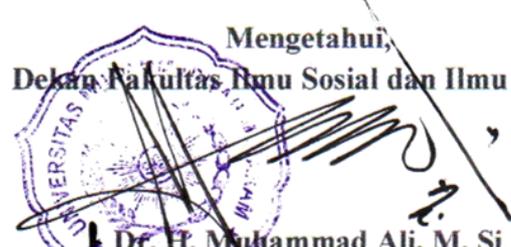
Ramavanto S.Sos., MM
NIDN. 0809096702

PP ()

Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN. . 0804116101

PN ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di universitas muhammadiyah mataram maupun di perguruan tinggi lainnya. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila didalam skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (sarjana) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram

Mahasiswa



Fitri Rahma
2019B1C033



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI..Rahma.....
NIM : 2019B1C033.....
Tempat/Tgl Lahir : Dompu..21..agustus..2000.....
Program Studi : administrasi..bisnis.....
Fakultas : FISIPol.....
No. Hp : 085-339-503506.....
Email : Fitri706@gmail.com.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan
dan Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
di Kabupaten Dompu

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 26.10.2023..2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


FITRI..Rahma.....
NIM. 2019B1C033


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Rahma
 NIM : 2019B1C 033
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu 21 Agustus 2000
 Program Studi : Administrasi bisnis
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 085 339 503 506
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran dinas Koperasi UMKM dalam Pemberdayaan
 dan Pensembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
 Kabupaten Dompu

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

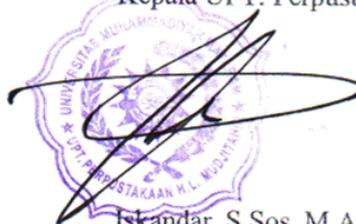
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 26/01/2023.....2023
 Penulis



Fitri Rahma
 NIM. 2019B1C033

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

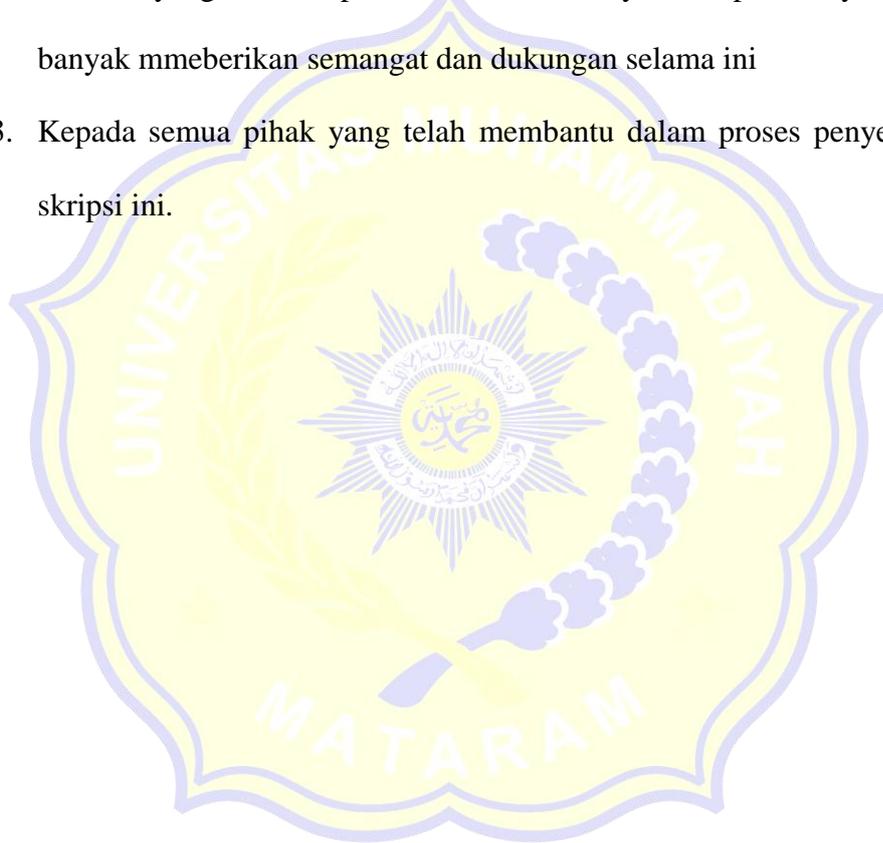
“Setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang terbaik, jangan menyerah dan tetap semangat”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah (busran ahalik) dan ibu (marwah) serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Sahabat yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu yang telah banyak mmeberikan semangat dan dukungan selama ini
3. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan rasa etrima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M Selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Junaidy, AM., M.P. Selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ramayanto, S.sos., M.M. Selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Orang Tua Tercinta Bapak Busran Ahalik dan Ibu Marwah H, Nurdin yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman prodi Administrasi bisnis Angkatan 2019

Mataram ,

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“PERAN PEMBERDAYAAN DINAS KOPERASI TERHADAP UMKM MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN DOMPU”** Tak lupa sholawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing ummatnya menuju jalan yang di ridhoi-Nya.

Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, sehingga proposal skripsi bisa terselesaikan. Ucapan terima kasih ini ditunjukkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M Selaku Ketua Prodi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Junaidy, AM., M.P. Selaku Dosen Pembimbing I di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Ramayanto, S.sos., M.M. Selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Orang Tua Tercinta Bapak Busran Ahalik dan Ibu Marwah H, Nurdin yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman prodi Administrasi bisnis Angkatan 2019

Walaupun telah berusaha menyelesaikan proposal ini dengan sebaik mungkin, saya menyadari bahwa proposal ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal ini dan dapat berguna bagi saya dan pembaca sekalian.

Sekian, Wassalamualaikum..Wr..Wb.

Peran Dinas Koperasi UMKM Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Dompu.

Fitri Rahma¹, Ramayanto², H, Junaidy³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dinas koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten dompu. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pengembangan disetiap negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap Negara. Khususnya dalam bidang ekonomi dan social. Dalam penelitian ini rumusan yang menjadi acuan bagaimana Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Dompu.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis deskriptif, tehnik penemuan informan dilakukan secara purposive, subyek dalam penelitian ini adalah kepala dinas dan masyarakat UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan obesrvasi dari dinas koperasi dan UKM di Kabupaten Dompu Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Dompu sejak tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami Peningkatan, akan tetapi dilain pihak usaha UMKM mengalami berbagai hambatan-hambatan. Antara lain pada kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan biaya, dan juga terbatasnya kemampuan dalam hak pemasaran.

Kata kunci: Peran Dinas Koperasi, pemberdayaan, pengembangan

The Role of the UMKM Cooperative Service in Empowering and Developing Micro, Small and Medium Enterprises (Case Study of Dompu Regency in 2022)

*Fitri Rahma¹ Ramayanto²
Drs. H. Junaidy³*

Abstract

The purpose of this study was to determine the function of cooperative and MSME offices in empowering and developing micro, small, and medium-sized businesses in Dompu Regency. Micro, small, and medium-sized companies (MSMEs) are one of any country's development priorities. This is due to MSMEs' significant contribution to the state. Particularly in economic and social spheres. The formulation that became the reference for the Empowerment Role of the MSME Cooperative Office in the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises in Dompu Regency was used in this study, so the purpose of this study was to determine the role of the cooperative and MSME offices in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises in Dompu Regency. The research method utilized in this study is qualitative descriptive research, the method of locating informants is done purposefully, and the subjects in this study are the heads of offices and the MSME community. According to the findings of this study, based on interviews and observations from cooperative and UKM services in Dompu Regency, the number of MSME players in Dompu Regency has increased from 2019 to 2021, although MSME firms have faced a variety of challenges. Among other aspects, the quality of human resources remains low, as are the costs and marketing rights.

Keywords: *The role of the Cooperatives Office, Empowerment, Development*

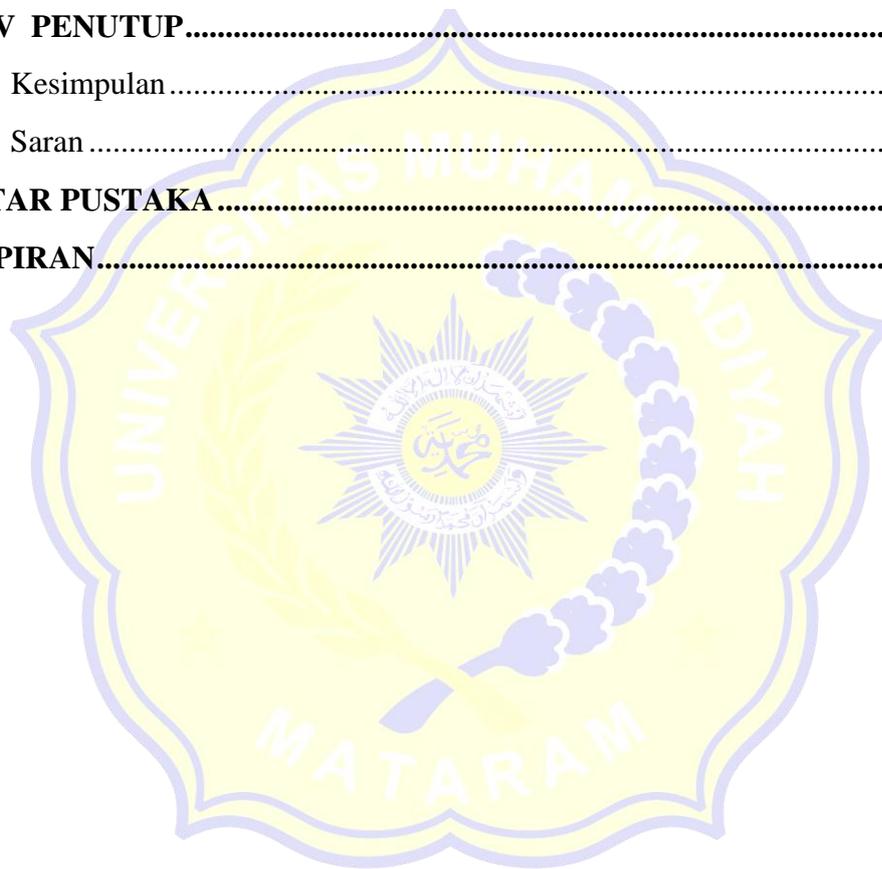
MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISONALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	6
1. 3 Tujuan penelitian	6
1. 4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kajian Teori	10
2.3. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Pendekan dan Metode penelitian	34
3.2. Lokasi Penelitian	34
3.3. Penentuan responden	35
3.4. Jenis dan Sumber Data	36

3.5. Tehnik Pengumpulan Data	37
3.6. Tehnik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
4.1. Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi.....	40
4.2 Karakteristik Informan	49
4.3 Pembahasan	51
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Dompu Tahun 2020	4
Table 2. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	9
Tabel 4. Identitas Informan	50
Tabel 5. Data Usaha UKM Sekabupaten Dompu	54
Tabel 6. Data jumlah pelaku UMKM berdasarkan klasifikasi Usaha.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas pengembangan disetiap negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap Negara. Khususnya dalam bidang ekonomi dan social. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal dan pemerataan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah. Oleh karena itu berbagai kebijakan dan program pendukung telah dirumuskan dan di implementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuik mendukung pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Kebijakan dan program pendukung tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Peran UMKM tidak hanya dirasakan oleh Negara berkembang saja. Negara-negara maju pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena adanya pertumbuhan UMKM. Sebagai contoh, Negara-negara maju di eropa memiliki proporsi UMKM diatas 90% (Johnson, 2007) beberapa negara di asia pasifik juga mengalami hal yang sama dengan negara-negara di eropa. Sebagai contoh, Negara Taiwan dan Korea selatan juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh

karna pertumbuhan UMKMnya. Bahkan Jepang telah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan inovasi UMKM (Gunawan 2014).

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun (Anggraini dan Nasution, 2013:105). Ketika krisis ekonomi menerpa dunia otomatis ikut berpengaruh memperburuk kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi krisis terjadi periode tahun 1997 hingga 1998, hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya terluas, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 anggota. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 anggota atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 anggota adalah Usaha bersekala besar. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan

yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi. Karena di dalam peraturan itu tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank (LPPI&BI,2015:1).

Disisi lain, sektor UMKM masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan klasik seperti permasalahan permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Kendala dalam mengakses perbankan terjadi karena langkanya sistem pendataan, rendahnya pengetahuan mengenai sistem keuangan, tingginya biaya layanan dan masih buruknya infrastruktur teknologi (Rahman, 2019).

Permasalahan permodalan menjadi kendala utama dalam mengembangkan UMKM termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana UMKM di NTB tidak akan berkembang jika tidak memiliki permodalan yang kuat dan memadai, meskipun pemerintah sudah mulai mengucurkan bantuan kredit dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi permasalahan permodalan UMKM, akan tetapi belum cukup, perlu adanya bantuan permodalan langsung dalam bentuk hibah yang dikelola oleh BUMN dan BUMD di daerah terutama di NTB agar mampu bersaing dengan UMKM Negara ASEAN lainnya.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 bab III Pasal V tentang UMKM memiliki modal omset sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Aset 50 juta dan Omset 300 juta
2. Usaha Kecil Aset 50 juta – 300 juta dan Omset 300 juta – 2.500 milyar
3. Usaha Menengah Aset 500 juta – 10 milyar dan Omset 2.500 milyar – 50 milyar

Tabel 1
Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kabupaten Dompu Tahun 2020

No.	Kecamatan	Pelaku Usaha Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1.	Dompu	375	97	19	491
2.	Kempo	94	33	1	128
3.	Hu'u	191	57	5	253
4.	Kilo	110	18	1	129
5.	Woja	168	48	-	216
6.	Pekat	191	99	5	295
7.	Manggelewa	148	80	12	240
8.	Pajo	89	12	-	101
Jumlah		1,366	444	43	1,853

Sumber : Dinas Koperasi Kabupaten Dompu, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per 31 Desember 2020

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa UMKM di Kabupaten Dompu secara keseluruhan jumlah dan skala usaha sangat banyak. Dalam

usaha mikro, kecil, menengah total keseluruhan sebanyak 1,853 usaha di kabupaten dompu.

Perkembangan UMKM di Wilayah Dompu masih terkendala oleh banyak hal, diantaranya UMKM yang rentan dari segi permodalan dan aspek manajemen (manajemen, produksi, pemasaran, kapasitas sumber daya manusia).

Pada kenyataannya meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Dompu cukup tinggi, namun belum mengalami kemajuan karena beberapa faktor diantaranya yaitu, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya penguasaan Teknologi dan Informasi (IT), permodalan, pemasaran serta masih kurangnya konsisten dan komitmen dalam pengembangan dan melanjutkan usaha.

Untuk mengatasi masalah dalam pengembangan UMKM tersebut, maka dibutuhkan peran Dinas Koperasi UMKM dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Dompu. Dengan demikian, Peran Dinas Koperasi UMKM di Kabupaten Dompu dapat membangkitkan citra positif dari masyarakat terhadap UMKM di Kabupaten Dompu.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tentang “ Peran Dinas Koperasi Umkm Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Khususnya di Kabupaten Dompu “.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Dompu ?
2. Bagaimana Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu setelah memperoleh Pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dinas koperasi dan UMKM dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu yang telah memperoleh Pemberdayaan Dari Dinas Koperasi dan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Secara teoritis dapat memberikan sumbangsih bagi peneliti berikutnya mengenai Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Dompu
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Koperasi dan UMKM. Penelitian

ini juga dapat diharapkan dapat menjadi salah satu literature/referensi dalam Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Kajian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami bagaimana Dinas Koperasi dan UKM berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Dompu.

b) Bagi Masyarakat

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bahan bacaan, pengetahuan, dan informasi kepada masyarakat tentang peran Dinas Koperasi UMKM dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Dompu.

c) Bagi Program Studi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber oleh penulis lain untuk penelitian studi UMKM tambahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keterlibatan Dinas Koperasi UMKM dalam memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

3. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dan landasan penelitian yang sama, yaitu strategi komunikasi dan kehumasan, penelitian ini memiliki nilai akademik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan judul penulis angkat, yaitu :

Table 2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Selfiawaty Fausiah tahun: 2019	Efektifitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan Oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi di Kecamatan Sigi Biromaru)	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan belum efektif dilakukan terlihat mulai dari belum sepenuhnya pemberian perlindungan terhadap mutu produk, belum adanya keseriusan pemerintah daerah dalam pemberian pembinaan berkelanjutan serta kemudahan melakukan perizinan pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang menyangkut berbagai aspek dalam perkembangan usaha.
2.	M Aidil Siddiq, Hj. Aji Ratna Kusuma, Fajar Apriani Tahun 2020	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan UMKM yang dilakukan telah berjalan baik sebagaimana yang terlihat dari bantuan peralatan, pemasaran produk dan program pelatihan kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi yang dilakukan secara maksimal. Adapun faktor pendukung dan penghambatannya yaitu, adanya dukungan kerja sama lembaga dalam setiap kegiatan sedangkan faktor penghambatnya tidak maksimalnya anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana.
3.	Euis Hasmita Putri Tahun 2017	Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektifitas pembinaan yang

		menengah (UMKM) di kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda)	dilakukan oleh dinas sudah berjalan cukup maksimal akan tetapi faktor penghambat yaitu anggaran, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas, kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas, kemampuan teknis produksi manajemen terbatas serta pemasaran yang relative sulit.
--	--	---	--

Tabel 3
Perbedaan dan Persamaan Penelitian
Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Judul Penelitian terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi di Kecamatan Sigi Biromaru) (Selfiawaty Fausiah Tahun : 2019)	Penelitian Selfiawaty Fausiah (2019) mengukur efektivitas pembinaan olahan pangan dan lokasi penelitian sedangkan penulis berfokus pada pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sumbawa untuk mengembangkan UMKM	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
2.	Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Trakan (Arini, Mohamad Nur Utomo 2017)	Penelitian Ariani dan Mohamad Nur Utomo (2017) dilakukan di Kota Trakan menggunakan analisis SWOT dan populasi seluruh UKM pada kota Trakan dan membahas tentang kajian strategi sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Sumbawa dengan variabel pembinaan.	Menggunakan metode yang sama yaitu purposive sampling
3.	Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM (Euis Hasmita Putri Tahun 2017	Membahas tentang efektivitas pelaksanaan program, lokasi dan tahun yang berbeda dengan penelitian penulis	Penelitian sama menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan wawancara observasi penyajian dan penarikan kesimpulan

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Tinjauan Tentang Peranan

Berfungsinya teori struktural berat pada teori peran. Menurut pengertian tersebut, setiap orang memiliki tugas tertentu untuk dimainkan dalam tatanan nasional. Hubungan sangat penting untuk memahami pentingnya peran, karena mereka kita untuk memahami harapan dan tindakan yang datang dengan posisi tertentu dalam hierarki organisasi.

Definisi peran seseorang didasarkan pada harapan orang lain. Menjadi perempuan, kulit hitam, atau cacat adalah contoh peran yang mungkin diberikan, tetapi mereka juga dapat dilakukan (misalnya menjadi penulis atau anggota parlemen). Dimungkinkan untuk memiliki banyak tanggung jawab pada saat yang bersamaan.

Seseorang dapat memiliki peran yang saling melengkapi (complementary) jika peran, perilaku, dan harapannya sesuai dengan orang-orang disekitarnya. Ketika dua peran tidak sesuai, konflik peran muncul ketika beberapa peran seseorang tidak sejalan, hal itu dapat menyebabkan konflik antar peran. Orang-orang di posisi yang sama mungkin memiliki konflik ketika harapan mereka tidak sesuai. Kurangnya kejelasan dalam fungsi seseorang dapat mengakibatkan ambiguitas peran.

Cara umum orang belajar tentang satu sama lain dalam situasi sosial adalah melalui menangkap isyarat nonverbal yang diberikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Persepsi orang dapat di ubah melalui cara kita menyajikan informasi dan

tindakan yang kita lakukan. Menurut interpretasi ini, peran tidak lebih dari “aktivitas” yang dilakukan dalam menanggapi harapan masyarakat yang terkait dengan status sosial seseorang. Dalam kebanyakan kasus, penampilan kita sudah di tentukan sebelumnya, dan ini termasuk ekspektasi masyarakat. Sementara faktor-faktor lain diperhitungkan, beberapa diberi bobot lebih besar daripada yang lain. Dengan kata lain, individu yang menstigmatisasi adalah persepsi orang lain tentang sesuatu tentang diri sendiri yang tidak diterima oleh masyarakat.

Sederhananya, peran adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu berdasarkan tempatnya dalam hierarki masyarakat dan berbagai pengelompokan sosial menyiratkan bahwa setiap orang memiliki semua yang mereka butuhkan, sesuai dengan status sosial mereka.

KBBI mendefinisikan peran sebagai “kumpulan sifat-sifat watak yang diharapkan atau dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peran adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa” (role).

Selain itu, menurut Depdiknas, “peran adalah tingkah laku yang diantisipasi atau dimiliki oleh seseorang yang berperan serta dalam suatu masyarakat, peran utama dibentuk oleh sifat-sifat orang yang unik atau khas”.

Bahwa: peran adalah ciri dinamis dari pekerjaan menurut Soerjono Soekanto (2006:212) (status). Seseorang dikatakan bertindak dalam suatu peran

jika ia melaksanakan tanggung jawab dan haknya sesuai dengan kedudukannya.

Dalam situasi ini, melakukan tiga fungsi:

1. Status seseorang dalam masyarakat menentukan aturan yang harus mereka patuhi. Dalam situasi ini, peran seseorang di tentukan oleh seperangkat norma yang mengatur perilaku mereka didepan umum.
2. Gagasan tentang peran seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi disebut sebagai peran.
3. perilaku individu yang berkontribusi pada kerangka sosial masyarakat dapat dicirikan sebagai peran.
4. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa peran menyangkut suatu tindakan atau perilaku yang mungkin dilakukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab peran tersebut sesuai dengan kedudukannya.

Komponen dinamis dari posisi sesuatu adalah perannya. Peran, menurut Ahmadi dalam Purba (2013:12), adalah harapan agar manusia bertindak dan berperilaku sesuai dengan fungsi sosialnya. Seseorang dikatakan memainkan peran ketika mereka memenuhi tugas yang terkait dengan posisinya.

Tiga hal berikut tercantum sebagai bagian dari fungsi tersebut, menurut Soekanto (2002: 243):

1. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh tempat dalam masyarakat dalam peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan konsep prihal yang dapat dilakukan oleh individu dan organisasi
3. Disisi lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari suatu struktur sosial

2.2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan potensi penuh mereka dengan membangun perusahaan lokal yang akan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat dan secara mandiri mendorong inovasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan komersial yang berpotensi untuk berkembang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk pemerataan dan pertumbuhan pendapatan. Keterlibatan Pemda dalam pemberdayaan melalui Dinas Koperasi dan UKM diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan rata-rata, dan mampu menyerap tenaga kerja tambahan. UMKM diantisipasi menjadi lebih krusial dalam menurunkan angka pengangguran.

UMKM harus mampu menjawab permasalahan global, seperti menggenjot inovasi produk dan jasa, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas wilayah pemasaran, agar berdaya di tengah globalisasi dan

persaingan yang ketat. Mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, maka diperlukan peningkatan nilai jual UMKM itu sendiri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri yang semakin menjenuhkan hub industri dan manufaktur Indonesia. UMKM mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2011 dengan membayar pajak sebesar 61,9 persen dari pendapatan produk domestik bruto (PDB), yang dirinci sebagai berikut: sektor usaha membayar pajak sebesar 36,28 persen dari PDB, sektor usaha kecil membayar pajak sebesar 10,9 persen dari PDB, dan sektor usaha menengah membayar pajak sebesar 14,7 persen dari PDB. Namun, kontribusi sektor usaha besar terhadap PDB melalui pembayaran pajak hanya sebesar 38,1%. (BPS, 2011).

2.2.3 Pengembangan

Untuk memperkenalkan, menumbuhkan, dan mengembangkan dasar kepribadian yang selaras antara pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat dan keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan manusia yang optimal dalam diri individu yang mandiri, pengembangan merupakan upaya yang dilakukan secara teratur dalam pendidikan, baik formal. atau informal.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 ayat (10) “ pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memperdayakan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembelian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing UMKM.”

Dalam artikel Widaningsih dan Ariayanti tentang pengembangan bisnis (2018:90), Brown dan Pettrello menyatakan bahwa frasa tersebut sering merujuk pada menciptakan dan mengawasi kemitraan strategis dan aliansi dengan bisnis independen lainnya. Dalam hal ini, bisnis memanfaatkan pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan untuk menemukan, menilai, dan memperkenalkan item baru dan ceruk pasar. untuk studi potensi pertumbuhan bisnis. Sedangkan di perusahaan besar, khususnya di industri teknologi industri terkait, istilah lebih sering mengacu pada administrasi dan kontrol kemitraan dan hubungan strategis lainnya. Strategi bisnis strategis menjadi penekanan utama pengembangan bisnis, yang juga mencakup akuisisi/divestasi produk dan pendanaan ekuitas.

A. Prinsip Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari pengelolaan perguruan tinggi. Ada beberapa prinsip mengenai pengembangan UMKM yang dapat di ajukan menurut Budiarto (2016:96) :

a) Kemaslahatan

Pola pengembangan UMKM harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh keseluruhan *stakeholders* yang terlibat. Dengan mengikuti prinsip umum kerja sama masa kini yang saling menguntungkan serta memberikan

kebaikan dan manfaat di berbagai mitra yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM.

b) Kemandirian bangsa

Pengarahannya pengembangan UMKM yang mengandung tujuan dapat memasok sebagian besar kebutuhan dalam negeri melalui karya hasil anak bangsa. Dengan kegiatan tersebut menjadikan pilar kemandirian bangsa.

c) Terukur

Setiap program harus memiliki tujuan dan sasaran yang tepat yang sesuai dengan rancangan seksama. Tahapan program pengembangan UMKM harus dicapai dengan jelas dan dapat diukur.

d) Komprehensif

Program-program yang dilaksanakan harus sesuai masing-masing institusi yang dapat mengikuti program tersebut. Skala prioritas dalam perencanaan program yang utama adalah penyelesaian masalah dan pemberdayaan UMKM.

B. Indikator Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan bentuk usaha agar dapat berkembangnya suatu usaha menjadi lebih baik dan berkembang sehingga mencapai suatu titik atau puncak kesuksesan (Nurrohmah, 2015). Dalam perkembangan usaha tolak ukur yang dijadikan keberhasilan dan berkembangnya suatu usaha terlihat dari adanya peningkatan penjualan, keuntungan, pelanggan, barang terjual, dan perluasan usaha dalam jangka waktu tertentu. Semakin jelas tolak ukur dalam perkembangan usaha maka akan semakin mudah bagi semua pihak dalam

memahami dan mengakui kebenaran dan keberhasilannya. Pendapatan penghasilan yang diterima dari suatu usaha atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang berupa barang dan jasa (Fitriyaningsih, 2012). Ketika pendapatan meningkat dalam hal tersebut yang dikatakan bahwa suatu usaha mengalami perkembangan.

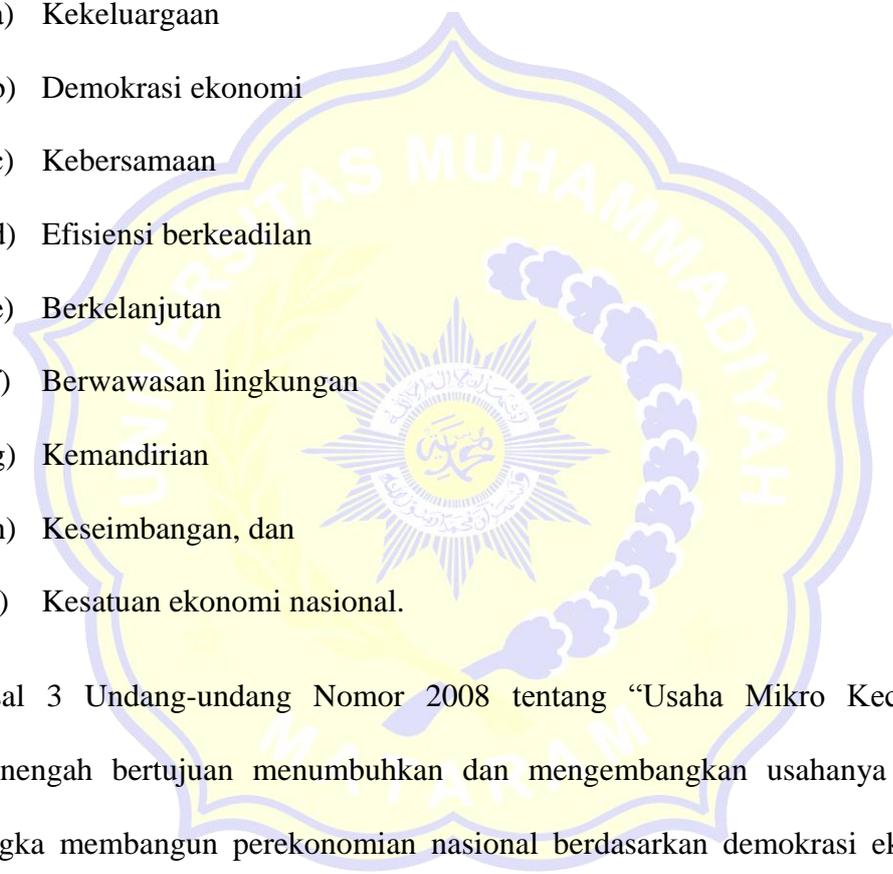
2.2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha mandiri yang dijalankan oleh orang. Kondisi berikut sesuai UU Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang beroperasi secara mandiri dari usaha lain dan dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang lebih besar, tetapi dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. perusahaan berukuran besar yang memenuhi definisi hukum tentang usaha kecil.
- 2) Usaha Menengah adalah usaha berdiri sendiri yang menguntungkan yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau diintegrasikan ke dalam Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan Jumlah Kekayaan Bersih atau Hasil Penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- 3) Korporasi Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha dalam negeri milik negara atau swasta, usaha patungan, dan perusahaan internasional yang menjalankan usaha di Indonesia.

Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2008 menentukan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berasaskan:

- 
- a) Kekeluargaan
 - b) Demokrasi ekonomi
 - c) Kebersamaan
 - d) Efisiensi berkeadilan
 - e) Berkelanjutan
 - f) Berwawasan lingkungan
 - g) Kemandirian
 - h) Keseimbangan, dan
 - i) Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 2008 tentang “Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Adapun manfaat UMKM menurut Absah, et.al (2016:6) yaitu sebagai berikut:

- a) Membuka lapangan pekerjaan

UMKM dapat memberi masyarakat lebih banyak pilihan pekerjaan dan cara untuk mengurangi pengangguran. Pengusaha UMKM menginginkan

individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi mereka juga memiliki pilihan untuk memberikan pelatihan saat ini bagi pekerja tanpa gelar yang lebih tinggi..

b) Meningkatkan kontribusinya terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB)
Metrik ekonomi makro yang disebut produk domestik bruto (PDB) menunjukkan kapasitas layanan selama periode waktu tertentu. Jadi ekonomi suatu negara dapat digambarkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

c) Menjadi salah satu solusi bagi permasalahan ekonomi kelas kecil dan menengah semakin banyaknya pelaku wirausaha maka akan menjadi solusi yang dapat memecahkan perekonomian suatu Negara. Hal tersebut dapat dilihat baik dari segi pemasukan Negara maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya kesempatan dalam UMKM akan membangun pola pikir yang kreatif baik dalam hal membangun usaha tanpa dimulai dengan modal yang besar. Dengan begitu para pelaku UMKM akan semakin terpacu dalam memproduksi dan memperluas jangkauan pasar.

Adapun potensi besar dari sektor UMKM menurut Budiarto, et.al, (2016: 17) yaitu karena UMKM tidak bergantung pada perekonomian dunia seperti, utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam proses produksinya. Selang waktu produksi dari para pelaku UMKM termasuk relative singkat dengan modal yang relative kecil. Kegiatan yang dilakukan juga merupakan kegiatan padat karya yang mendayagunakan *skill* dan semi *skill workers*. Para pelaku UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan

serta memiliki peluang besar dalam pengembangan dan adaptasi berbagai teknologi, tidak hanya itu para pelaku UMKM juga dapat menisci berbagai ceruk pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar

A. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00,
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00
3. Kriteria Usaha Menengah
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan 10.000.000,000 tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan perkembangan selain berdasarkan Undang-Undang yaitu menurut Rahmana (2008) pengelompokan UMKM dibagi dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

1. *livelihood Activities*, yaitu UMKM dengan kesempatan bekerja untuk mencari nafkah, dan lebih umum dikenal sebagai sector informal. Misalnya pedagang eceran di kaki lima
2. *Micro Enterprise*, yaitu UMKM bersifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan dalam dirinya
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM juga memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM juga memiliki jiwa kewirausahaan dan melakukan perubahan dari UMKM menjadi Usaha Besar (UB).

B. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Bisnis Kriteria usaha kecil di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada masalah yang ditangani dan organisasi yang terlibat dalam sektor tersebut, demikian menurut penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ini tahun 2018 di Anora. Sebaliknya, di negara lain, kualitas departemen UMKM pada akhirnya ditetapkan oleh personel perusahaan, yang lebih diutamakan daripada semua faktor lainnya. Industri UMKM umumnya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti aturan standar pengelolaan pembukuan. Terkadang sulit untuk melihat kinerja bisnis karna pembukuan tidak *up to date*.
2. Margin perdagangan cenderung tipis karena persaingan yang sangat kuat.
3. Mode terbatas
4. Pengalaman dalam manajemen bisnis masih sangat terbatas
5. Ukuran ekonomi sangat rendah sehingga sulit untuk mengharapkan pengurangan biaya jangka panjang menjadi efektif.
6. Keterampilan yang sangat dalam pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar
7. Kemampuan memperoleh sumber pendanaan di pasar modal masih rendah.

Mengingat keterbatasan sistem manajemen, perusahaan yang menghimpun dana dipasar modal harus menjaga transparansi sesuai dengan standar sistem manajemen.

C. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Tulus Tambunan (2017), kelompok UMKM terdiri atas:

1. Pembagian organisasi yang melakukan kegiatan pertanian di tempat-tempat tertentu untuk tujuan komersial dikenal dengan sektor pertanian.
2. Bidang Pertambangan adalah suatu departemen dalam suatu unit produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu. Ini menyiapkan dan mengekstrak zat kimia, biji-bijian, mineral, permata, dan jenis bantuan lainnya, termasuk bijih alami yang merupakan bijih padat, cair, atau gas. Jual beli.

3. Industri yang bertujuan untuk mengubah bahan mentah/bahan baku menjadi produk jadi/produk setengah jadi dan produk bernilai rendah untuk tujuan komersial kepada pengguna. Industri yang berbasis di lokasi tertentu dan berfungsi sebagai divisi dari unit produksi.
4. Sektor Listrik, Air dan Gas
 - a. Bidang Listrik, Air, dan Gas Subbidang energi adalah subbidang unit produksi yang menyelenggarakan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk rumah, usaha, lembaga, dan pengguna lain untuk penggunaan komersial. Itu terletak di area tertentu.
 - b. Subbidang air minum adalah subbidang unit produksi yang berkedudukan di suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan penyaringan air dan distribusi komersial ke rumah, institusi, tempat usaha, dan pengguna lainnya melalui tangki terminal air.
 - c. Subbidang gas adalah subbidang unit produksi yang terletak di tempat tertentu dan bergerak dalam penyediaan gas kota ke rumah, bisnis, institusi, dan pengguna lain untuk penggunaan komersial.
5. Praktek arsitektur adalah suatu komponen dari suatu unit produksi yang beroperasi pada suatu tapak tertentu dan menghasilkan suatu bangunan untuk konstruksi yang berhubungan dengan tempat tinggal, baik digunakan untuk keperluan rumah tinggal maupun fasilitas komersial lainnya.
6. Bidang perdagangan, hotel, dan restoran terdiri dari unit produksi (unit) yang terletak di tempat tertentu dan digunakan untuk kegiatan niaga, grosir,

dan eceran yang meliputi penjualan kembali barang baru atau bekas (tanpa mengubah bentuknya).

7. Sektor Transportasi dan Komunikasi

a. Transportasi dimiliki oleh orang lain di darat, di laut, atau di udara, dan mereka dapat menghasilkan uang dengan menggunakan kendaraan bertenaga atau tidak bertenaga untuk memindahkan orang, barang jadi, atau ternak dari satu tempat ke tempat lain.

b. indakan berkomunikasi dengan penerima akhir untuk keuntungan komersial sambil mempertahankan struktur asli komunikasi.

8. Harus ada satu atau lebih orang yang bertanggung jawab mengelola risiko usaha di sektor jasa dan keuangan, serta operasi sektor jasa lainnya.

D. Masalah-Masalah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Diakui bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Dompu, terutama dalam hal perluasan lapangan kerja, pencapaian pemerataan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan mendorong ekspor nonmigas. Melalui berbagai program pengembangan dan pengembangan usaha, pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan usaha. usaha kecil dan menengah, namun hingga saat ini, pertumbuhan usaha kecil dan menengah sangat besar.

Masalah-masalah berikut biasanya dihadapi oleh UMKM lain (Suseno, 2019):

1. Masalah Internal

- a. Basis modal kerja kecil
- b. Sulit untuk menemukan bahan baku berkualitas tinggi dan berbiaya rendah. Mayoritas UMKM memiliki kemampuan yang rendah karena menggunakan peralatan yang sudah usang atau alat produksi yang manual secara internal.
- c. Tidak banyak tenaga kerja berkualitas yang tersedia karena mayoritas pemilik UMKM hanya berpendidikan SLTA.
- d. Tantangan pemasaran diakibatkan oleh kurangnya barang berkualitas tinggi, kampanye pemasaran yang efektif, dan persaingan antara barang identik di pasar domestik dan internasional.
- e. Karena kurangnya kesiapan dan ketidaktahuan tentang pasar dan jaringan pemasaran, UMKM dapat mengandalkan mediasi untuk menjalankan kegiatan usaha.
- f. Pelanggan modern atau konsumen nasional tidak lagi menemukan banyak desain item UMKM yang relevan atau diperlukan.
- g. Pemangku kepentingan UMKM tidak senang dengan betapa sulitnya membayar uang bergulir yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan harga BBM baru-baru ini.

2. Masalah Eksternal

- a. UMKM memiliki akses terbatas ke sumber keuangan, yang mencegah mereka mengembangkan bisnis mereka. Hal ini disebabkan semua bank, terutama pelaku komersial, membutuhkan agunan.

- b. Banyak keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan besar sebagai akibat dari distorsi pasar. Misalnya, kepercayaan, izin usaha, keringanan pajak, dan penawaran bagus.
- c. Ada undang-undang yang mendukung inisiatif untuk membantu UKM tumbuh. Untuk meningkatkan pajak dan biaya kota, misalnya, peraturan daerah diberlakukan.

E. Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil adalah usaha yang produktif secara ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha yang lebih besar tetapi secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikendalikan, atau diintegrasikan ke dalam perusahaan yang lebih besar tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bergabung baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

F. Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Kegiatan untuk pertumbuhan UMKM dapat dilihat dari segi produktivitas, motivasi, adaptasi, dan integrasi. Kegiatan pengembangan dilakukan sesuai

dengan program dan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penulis dapat menyimpulkan bahwa koperasi dan usaha kecil berduit berfungsi dengan baik dalam pengembangan UKM, antara lain setelah menyelesaikan survei. Berikut ringkasan detailnya:

1. Produktivitas ditunjukkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Dompu yang telah banyak melakukan tindakan untuk melakukan pengembangan usaha sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam Renstra. Tantangannya, bagaimanapun, adalah dalam memberikan kode pelatihan.
2. Visi dan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan motivasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Dompu, dan hak yang diberikan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan motivasinya.
3. Sasaran program dan kegiatan dalam Rencana Strategis telah diubah dan diperbarui, tetapi operasi internal di antara staf belum dioptimalkan karena beberapa karyawan masih kurang menguasai teknologi.
4. Meskipun upaya sosialisasi tidak efektif, namun kerja integrasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi akan melahirkan inisiatif-inisiatif yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam Renstra.

G. Pelaksanaan Program

Hasil logis dari perumusan kebijakan adalah implementasinya. Lebih dari sekedar mengubah keputusan politik menjadi prosedur operasi standar melalui jalur birokrasi terlibat dalam implementasi kebijakan. Persaingan, pilihan, dan

individu semuanya berperan dalam seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Akibatnya, proses implementasi kebijakan menjadi krusial. Bahkan J.O. Pak Udoji, otoritas terkemuka dalam kebijakan Afrika, menyatakan: "Penegakan kebijakan sangat penting, mungkin lebih penting daripada pembuat kebijakan. Kebijakan adalah aspirasi langsung atau ide bagus yang, jika tidak dilaksanakan, akan diarsipkan secara memadai (Wahab, 2016).

"Ini terkait dengan berbagai operasi untuk menjalankan eksekusi program," kata Patton dan Sawichi (Tangkilisan, 2017). "Eksekutif dalam posisi ini mengatur bagaimana kebijakan tertentu dikonfigurasi, diperiksa, dan diterapkan."

Akibatnya, program dapat dilihat sebagai komponen utama yang diperlukan untuk mencapai pelaksanaan kegiatan. Dukungan untuk implementasi program karena mencakup berbagai elemen seperti:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipedomani dan prosedur yang harus dilalui.
3. Adanya aturan-aturan yang harus di pedomani dan prosedur yang harus dilalui
4. Adanya perkiraan anggraan yang dibuthkan
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Semua proses perencanaan lebih terorganisir di bawah platform ini, membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Adanya kelompok masyarakat yang

menjadi sasaran program merupakan syarat kedua yang harus dipenuhi selama proses pelaksanaan. Setelah itu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari inisiatif yang telah ditetapkan dan mengalami perubahan dan peningkatan dalam kehidupan mereka. Anda tidak dapat memberi manfaat kepada masyarakat dengan cara apa pun, dan Anda dapat mengklaim bahwa program tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Kemampuan pembuat kebijakan untuk menjalankan program kebijakan yang disarankan untuk diseleksi oleh pembuat kebijakan tidak menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dapat ditunjukkan dari kegagalan atau keberhasilan implementasi. Proses pelaksanaan program memerlukan upaya pembuat kebijakan untuk memilih langkah-langkah yang memungkinkan birokrat bersedia melayani dan mengendalikan perilaku kelompok sasaran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau pegawai pemerintah dari sasaran yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan adalah pelaksanaan atau eksekusi program.

H. Indikator Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan bentuk usaha agar dapat berkembangnya suatu usaha menjadi lebih baik dan berkembang sehingga mencapai suatu titik atau puncak kesuksesan (Nurrohmah, 2015). Dalam perkembangan usaha tolak ukur yang dijadikan keberhasilan dan berkembangnya suatu usaha terlihat dari adanya peningkatan penjualan, keuntungan, pelanggan, barang terjual, dan

perluasan usaha dalam jangka waktu tertentu. Semakin jelas tolak ukur dalam perkembangan usaha maka akan semakin mudah bagi semua pihak dalam memahami dan mengakui kebenaran dan keberhasilannya. Pendapatan penghasilan yang diterima dari suatu usaha atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang berupa barang dan jasa (Fitriyaningsih, 2012). Ketika pendapatan meningkat dalam hal tersebut yang dikatakan bahwa suatu usaha mengalami perkembangan.

I. Prinsip Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari pengelolaan perguruan tinggi. Ada beberapa prinsip mengenai pengembangan UMKM yang dapat di ajukan menurut Budiarto (2016:96) :

a) Kemaslahatan

Pola pengembangan UMKM harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh keseluruhan *stakeholders* yang terlibat. Dengan mengikuti prinsip umum kerja sama masa kini yang saling menguntungkan serta memberikan kebaikan dan manfaat di berbagai mitra yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM.

b) Kemandirian bangsa

Pengarahan pengembangan UMKM yang mengandung tujuan dapat memasok sebagian besar kebutuhan dalam negeri melalui karya hasil anak bangsa. Dengan kegiatan tersebut menjadikan pilar kemandirian bangsa.

c) Terukur

Setiap program harus memiliki tujuan dan sasaran yang tepat yang sesuai dengan rancangan seksama. Tahapan program pengembangan UMKM harus dicapai dengan jelas dan dapat diukur.

d) Komperhensif

Program-program yang dilaksanakan harus sesuai masing-masing institusi yang dapat mengikuti program tersebut. Skala prioritas dalam perencanaan program yang utama adalah penyelesaian masalah dan pemberdayaan UMKM.

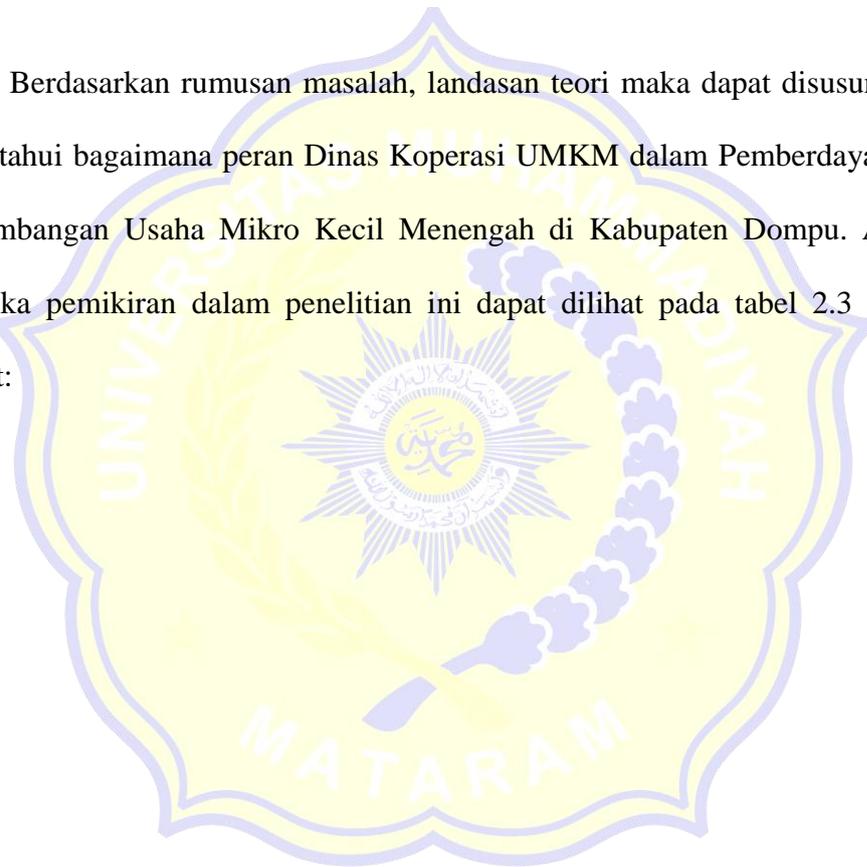
J. Indikator Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan bentuk usaha agar dapat berkembangnya suatu usaha menjadi lebih baik dan berkembang sehingga mencapai suatu titik atau puncak kesuksesan (Nurrohmah, 2015). Dalam perkembangan usaha tolak ukur yang dijadikan keberhasilan dan berkembangnya suatu usaha terlihat dari adanya peningkatan penjualan, keuntungan, pelanggan, barang terjual, dan perluasan usaha dalam jangka waktu tertentu. Semakin jelas tolak ukur dalam perkembangan usaha maka akan semakin mudah bagi semua pihak dalam memahami dan mengakui kebenaran dan keberhasilannya. Pendapatan penghasilan yang diterima dari suatu usaha atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang berupa barang dan jasa (Fitriyaningsih, 2012). Ketika pendapatan meningkat dalam hal tersebut yang dikatakan bahwa suatu usaha mengalami perkembangan.

2.3 Kerangka Berpikir

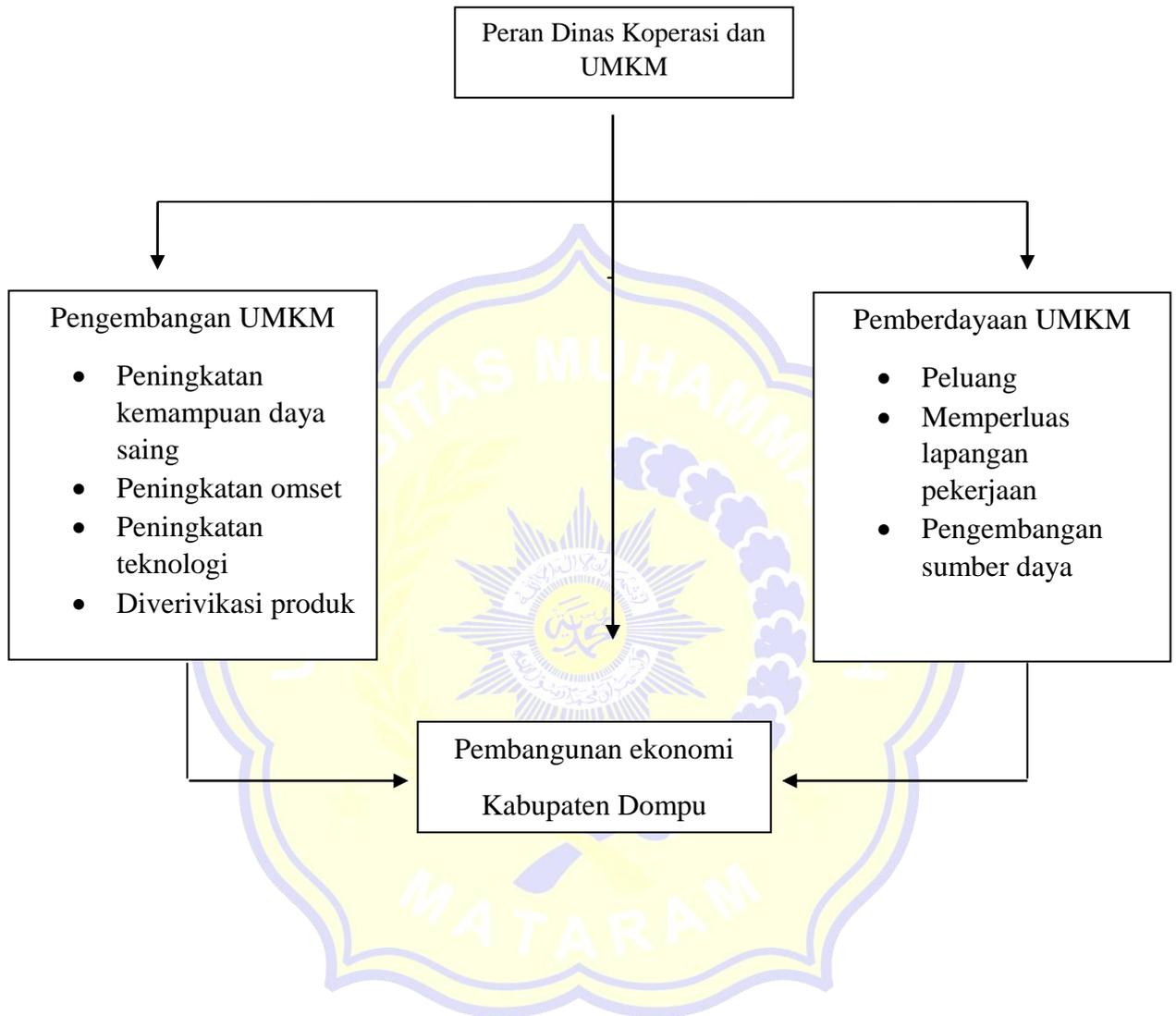
Peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Dompu yang terus terjadi menjadi sarana penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi dalam usaha pengembangan UMKM di Kabupaten Dompu mengalami beberapa hambatan seperti, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori maka dapat disusun untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi UMKM dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Dompu. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Peneliti dapat memahami bagaimana peran dinas koperasi UMKM dalam memberdayakan dan memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Dompu berkat metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencoba mendeskripsikan permasalahan terkait peran Dinas Koperasi UMKM dalam memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Dompu melalui penelitian kualitatif ini. Untuk menganalisis secara menyeluruh konteks situasi saat ini dan interaksi unit sosial, peneliti memeriksa orang atau unit.

Djaman Satori dan Aan Komariah (2017) mengklaim bahwa penelitian kualitatif, yang difokuskan pada pengumpulan fakta-fakta terkait dan prosedur analitis yang diperoleh dalam kondisi alami dan peradaban tertentu, menggambarkan realitas berbasis kata dengan tepat. Situasi tersebut dibuat jelas melalui strategi penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Koperasi dan UMKM. Jl. Bhayangkara No. 12 Cluster 2 Lantai III Bada Dompu 84211 (Diskop) Kabupaten Dompu. Penelitian ini selanjutnya dilakukan ditempat produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasi Goreng Khas Dompu, Ikan Kering Desa Jala, Batu Bata Pres Pajo, Kain Tenun, Centra UMKM Penjahit

Penentuan lokasi penelitian berguna untuk mendapatkan data-data yang akurat serta peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan dan fokus penelitian untuk mendapatkan yang sesuai dengan ciri khusus dan diharapkan dapat memberikan jawaban dari masalah penelitian.

3.3 Penentuan Responden

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan rincian tentang keadaan dan konteks penelitian, menurut Moleong (2019: 97). Peneliti melihat melalui responden untuk mengidentifikasi informan dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan. Menggunakan metode purposive sampling dalam penelitian ini. Strategi pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu adalah teknik purposive sampling (Sugiyono, 2011: 103).

Untuk memperoleh data maka diperlukan informan dalam penelitian ini. Menurut suyanto (2011 : 172) terdapat dua kategori informan sebagai berikut :

1. Informan kunci

Merupakan seseorang yang mengetahui informasi pokok yang diperlukan oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Dompu dan Kabag Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Dompu

2. Informan Utama

- a. UMKM Nasi Goreng Khas Dompu

Alasan peneliti memilih Pemilik dan Pemilik UMKM menjadi Informan utama karena UMKM ini merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan

UMKM di Kabupaten Dompu yang terlibat dalam pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu.

b. Ikan Kering Desa Jala

Alasan peneliti memilih Pemilik dan Pemilik UMKM menjadi Informan utama karena UMKM ini merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu yang terlibat dalam pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu.

c. Batu Bata Pres Pajo

Alasan peneliti memilih Pemilik dan Pemilik UMKM menjadi Informan utama karena UMKM ini merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu yang terlibat dalam pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu.

d. Uma Muna Galeri Tenun

Alasan peneliti memilih Pemilik dan Pemilik UMKM menjadi Informan utama karena UMKM ini merupakan UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu yang terlibat dalam pemberdayaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Dompu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan orang yang berkepentingan, data lisan, penjelasan, dan debat disebut sebagai data kualitatif. Dua sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut sugiyono (2012: 225) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dan diberikan kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu dilakukan observasi mengenai keadaan dan situasi yang dituliskan dalam bentuk catatan

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan peneliti. Sumber data skunder merupakan hasil dari primer yang berupa wawancara dan observasi lapangan.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh langsung di tempat penelitian melalui kegiatan investigasi yang dihubungkan dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh informasi yang lengkap dikumpulkan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data dasar. Berikut ini menjelaskan bagaimana metode ini beroperasi:

8. Metode interview (Wawancara)

Informasi berikut merupakan panduan teknis pembuatan karya ilmiah dengan wawancara mendalam dimana pelapor dapat memberikan informasi yang lengkap dan detail. Pertanyaan terbuka tentang topik yang dicakup oleh penelitian ini diarahkan pada 10 informan atau otoritas sebagai bagian dari strategi ini.

Orang yang melakukan wawancara adalah "pewawancara", yang menggunakan teknik wawancara komprehensif dan berfungsi sebagai "pemimpin" proses. Di sisi lain, informan adalah orang yang diwawancarai yang dimintai informasi oleh pewawancara; merekalah yang bertanggung jawab dan memahami data, informasi, dan fakta yang mereka temukan (Burhan Mungin, 2017).

9. Metode observasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumentasi yang dapat mendukung data yang mendasarinya. Teknik-teknik berikut dapat digunakan untuk menerapkan metode dokumentasi: Menggunakan catatan atau dokumen dari lokasi peneliti atau dari sumber lain yang relevan dengan topik penelitian, panduan dokumentasi adalah alat untuk pengumpulan data dokumen demi dokumen.

10. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang terjadi sebelumnya. Dokumen dapat berupa tulisan, karya seni monumental, atau foto. Buku harian, riwayat hidup, dan biografi adalah contoh dokumen tertulis. dokumen yang berupa karya seni, khususnya patung, film, dan foto (Sugiono 2014: 240).

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), analisis data adalah proses melihat, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan data dengan tujuan merumuskan suatu hipotesis dan mengarahkannya pada suatu temuan atau teori. Ada beberapa prosedur untuk melakukan analisis data:

1. Reduksi Data

Dengan berkonsentrasi pada pengumpulan informasi yang paling penting dari penelitian, memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mengidentifikasi tema dan pola yang mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data dan memenuhi semua persyaratan, pengurangan ini tercapai.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dapat ditampilkan dan dijelaskan secara efektif melalui presentasi. Data tampilan yang disajikan sebagai teks naratif merupakan hasil dari reduksi data. sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami data yang dihasilkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dibuat masih spekulatif dan dapat direvisi jika bukti kuat tidak ditemukan selama fase pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika studi kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, hasil awal divalidasi dan dikonfirmasi oleh informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, kesimpulan yang dibuat adalah kesimpulan yang valid.